

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Polri bukanlah satu-satunya alat negara yang bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban, ada banyak pihak diantaranya adalah masyarakat yang memiliki peranan dan tanggungjawab memelihara ketertiban dan keamanan. Ketertiban bukan menjadi isu milik Polri saja, walaupun dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia diatur bahwa lembaga Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Setiap orang memiliki hak untuk merasa aman (tidak diganggu oleh bahaya atau rasa takut), akan tetapi hal tersebut sangat sulit untuk dijamin oleh kepolisian seluruhnya, mengingat banyaknya faktor yang terlibat dalam memberikan keamanan. Sebagaimana dalam pendapat Sadjijono (2008):

“Faktor-faktor dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal polisi dapat berupa minimnya anggaran untuk pemeliharaan ketertiban masyarakat secara keseluruhan, kuantitas personel polisi yang belum sebanding dengan pertumbuhan masyarakat, sistem gaji yang belum memadai anggota polisi sehingga berpengaruh pada motivasi kerja, maupun berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh oknum polisi. Faktor eksternal antara lain ketidakpedulian masyarakat terhadap hukum dan keberadaan pihak luar yang terlibat dalam penciptaan ketertiban masyarakat, namun bersikap mengacuhkan hukum”.

Kondisi demikian mengakibatkan polisi hanya bertindak menerima dan menyikapi laporan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ketika laporan dari masyarakat telah ditindaklanjuti, tugas polisi sebagai pengayom dan pelindung

masyarakat dalam memberikan pelayanan pada masyarakat telah selesai. Padahal, esensi dari menjaga ketertiban adalah polisi dapat mencegah kejahatan agar dampak yang ditimbulkan akibat proses kejahatan itu tidak terjadi pada masyarakat yang belum mengalaminya.

Para pimpinan Polri menyadari bahwa metode dan teknik yang dilaksanakan selama ini tidak efektif dalam menanggulangi kriminalitas dan kondisi kamtibmas yang dihadapi masyarakat dewasa ini. Untuk menjawab semua itu, Polri perlu mandiri dan profesional yang mengacu kepada supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan HAM, transparan serta berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan ada pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Paradigma baru Polri tersebut menjadi kerangka dalam mewujudkan jati diri, profesionalisme, dan modernisasi Polri sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, berada dekat masyarakat dan membaaur bersama masyarakat.

Paradigma baru ini dikenal sebagai *Community Policing* atau Polmas.

“Polmas adalah sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendukung terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi dalam mencegah masalah dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan” (Sutanto *et al.* 2008: 25).

Kapolri (Kepala Kepolisian Republik Indonesia) pada saat itu Jend.Pol.Drs.Sutanto mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/737/X/2005, tanggal 13 Oktober 2005, tentang kebijakan dan strategi penerapan Polmas. Kebijakan dan Strategi Polmas telah berjalan selama 4 tahun. Kebijakan ini sudah diterapkan oleh seluruh Polri terutama di tingkat Polsek (Kepolisian Sektor) setingkat dengan Kecamatan.

Tujuan dari adanya perpolisian masyarakat (Polmas) adalah tercapainya kemitraan yang terjalin antara masyarakat dengan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Akan tetapi timbul permasalahan, kebijakan Polmas tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Keterangan yang peneliti dapat dari bagian Binamitra Polres Cianjur, mengenai kebijakan Polmas di wilayah hukum Polres Cianjur tidak begitu berjalan, meskipun ada beberapa wilayah yang sudah berjalan seperti di Polsek Pacet.

Salah satu permasalahan yang mengakibatkan kebijakan perpolisian masyarakat masih belum mencapai target yang diharapkan adalah persepsi negatif masyarakat terhadap Polri. Sebagaimana dikemukakan oleh Muradi (2009: 311), bahwa selama lebih dari delapan tahun reformasi Polri masih belum mampu menaklukkan hati masyarakat untuk berpersepsi positif terhadap Polri.

Persepsi negatif masyarakat terhadap Polri menjadi bagian dari problematika implementasi perpolisian masyarakat. Selain dari persepsi negatif masyarakat terhadap Polri, Muradi (2009: 312) menyebutkan kendala perpolisian masyarakat adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang keamanan lingkungan, keragaman kondisi sosiologis masyarakat, ambiguitas sikap masyarakat, kesiapan sarana dan prasarana, Pemda dan instansi lain tidak merasa dilibatkan, dan interaksi polisi-masyarakat masih *police center*.

Dari hasil penelitian Sindikat 7 Pasis Selapa Polri Dikreg XXXV TA 2006 dari tanggal 31 Mei s/d 2 Juni 2006 di Polsek Pacet Polres Cianjur menyimpulkan, bahwa sebagian masyarakat telah mengetahui program Polmas bahkan sangat membutuhkan program tersebut. Bahkan, masyarakat ikut mendukung program

Polmas tersebut. Masyarakat mengetahui istilah Polmas karena anggota Polsek berperan aktif sebagai Babinkamtibmas dengan sering melaksanakan kunjungan kepada masyarakat.

Penelitian Polmas juga dilakukan oleh Majalah Blakasuta Edisi 15 Januari 2009 di Wilayah III Cirebon. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh data bahwa 79 persen masyarakat membutuhkan adanya perpolisian masyarakat (Polmas).

Berdasarkan latar belakang yang diperoleh dari Bagian Binamitra Polres Cianjur serta penelitian Selapa Polri dan majalah blakasuta tersebut. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang persepsi masyarakat terhadap citra perpolisian masyarakat.

Dalam memandang sesuatu, setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda. Persepsi seseorang timbul dari dalam diri masing-masing. Menurut Moskovitz dan Orgel (Walgito, 1994: 53), persepsi didefinisikan sebagai suatu proses yang *integrated* dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Selanjutnya menurut Horovitz (2000), persepsi adalah anggapan yang muncul setelah melakukan pengamatan di lingkungan sekitar atau melihat situasi yang terjadi untuk mendapatkan tentang sesuatu.

Persepsi mencakup penilaian seseorang terhadap objek, baik itu yang terwujud maupun tidak berwujud. Persepsi mencakup penilaian seseorang terhadap objek, dimana penilaian tersebut berbeda antara satu orang dengan yang lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mencoba meneliti persepsi masyarakat Kecamatan Warungkondang terhadap citra perpolisian masyarakat (*community policing*) di Polsek Warungkondang dalam wilayah hukum Polres Cianjur.

### **B. Rumusan dan Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah “Bagaimanakah persepsi masyarakat Kecamatan Warungkondang terhadap perpolisian masyarakat (*community policing*) di Polsek Warungkondang dalam wilayah hukum Polres Cianjur?”

Supaya penelitian ini lebih terarah dalam operasionalisasinya maka rumusan masalah tersebut dijabarkan menjadi beberapa sub masalah, yaitu :

1. Faktor apakah yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kecamatan Warungkondang terhadap perpolisian masyarakat di Polsek Warungkondang dalam wilayah hukum Polres Cianjur?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh petugas perpolisian masyarakat (Polmas) dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat di Kecamatan Warungkondang?
3. Upaya apakah yang harus dilakukan kepolisian untuk meningkatkan perpolisian masyarakat (Polmas) di Polsek Warungkondang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap perpolisian masyarakat (*community policing*) di Polsek Warungkondang dalam wilayah hukum Polres Cianjur.
2. Mengetahui peran dan kendala perpolisian masyarakat (Polmas) dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat.
3. Mengetahui upaya meningkatkan perpolisian masyarakat (Polmas) di Polsek Warungkondang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti membagi manfaat penelitian menjadi dua bagian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian secara teoritis adalah:

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang sosial kemasyarakatan.
2. Menambah wawasan mengenai masalah sosial kemasyarakatan.
3. Meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kuantitatif.



Sedangkan manfaat penelitian secara praktis, dibagi menjadi manfaat tersebut kepada Polri, masyarakat, dan pemerintah. Adapun manfaat tersebut adalah:

1. Bagi Polri, ada dua manfaat yang peneliti dapatkan, yaitu untuk aparat Polri dan lembaga Polri.
  - Bagi aparat Polri, adalah Polri yang dipercaya tercermin dari sikap dan perilaku segenap personil Polri, baik dalam kehidupan pribadi sebagai bagian dari komunitas maupun dalam pelaksanaan tugas mereka, yang menyadari bahwa warga komunitas adalah *stakeholder* kepada siapa mereka dituntut untuk menyajikan layanan kepolisian sebagaimana mestinya.
  - Bagi lembaga Polri, mendorong lembaga Polri agar senantiasa dalam melaksanakan tugasnya harus dijiwai dengan semangat melayani dan melindungi sebagai suatu kewajiban profesi.
2. Bagi masyarakat, terwujudnya kerjasama polisi dengan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban dalam rangka menciptakan ketertiban umum.
3. Bagi pemerintah, mengetahui peran serta pemerintah dalam mendukung kebijakan Polmas.

## E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah penafsiran dan untuk memperoleh kesatuan arti dan pengertian dari judul penelitian ini. Perlu kiranya peneliti memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun beberapa istilah sebagai berikut:

### 1. Persepsi

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Jalaludin Rahmat, 2004: 51).

Persepsi adalah proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera (Kartini Kartono, 2005: 358).

### 2. Masyarakat

R. Lington (Ahmadi, 1991: 225) mengemukakan pengertian masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup hidup dan bekerjasama, sehingga mereka ini dapat mengorganisasikan dirinya berfikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

### 3. Masyarakat Setempat

Soekanto (2003: 149), memberikan definisi masyarakat setempat adalah masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batas-batas tertentu dimana faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar diantara para anggotanya, dibandingkan dengan penduduk diluar batas wilayahnya.



Dapat disimpulkan secara singkat bahwa masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu. Dasar masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan masyarakat setempat tersebut.

4. Polri (Polisi Republik Indonesia)

Polri adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

5. Polmas (Perpolisian Masyarakat)

Polmas adalah sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendukung terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi dalam mencegah masalah dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan” (Sutanto *et al.* 2008: 25).

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Rumusan permasalahan yang akan diteliti memerlukan pengamatan dan penelitian secara mendalam, oleh karena itu, pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. Nasution (1996: 5), mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai berikut :

“Pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Dengan demikian salah satu sifat pendekatan kualitatif adalah dengan deskriptif, artinya dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif yang banyak dalam bentuk laporan dan uraian, penelitian ini juga tidak menggunakan angka-angka dan statistik, walau tidak menolak data kuantitatif”.

### **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang didasarkan pada pemecahan masalah berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan yang ada pada saat sekarang dan memusatkan pada masalah sosial aktual yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Nazir (1998: 63) yang menyatakan bahwa:

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau sesuatu pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang terjadi”.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2008: 224) adalah:

“Langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”.

Adapun teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan adalah:

#### 1) Wawancara

Esterberg (Sugiyono, 2008) mendefinisikan *interview* sebagai berikut :

“*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”.

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dibutuhkan untuk menguatkan data tentang Polmas, persepsi, dan kendalanya di lapangan.

Pihak yang diwawancara adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, sebagian masyarakat, aparat Kecamatan/Desa, dan petugas Polmas Polsek Warungkondang.

#### 2) Angket

Angket merupakan “Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya” (Sugiyono, 2008: 142).

Angket dibutuhkan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap Polmas.

Angket diperlukan dalam penelitian ini sebagai data pendukung wawancara.

- 3) *Fieldnote* atau catatan penelitian digunakan untuk mendapatkan data yang penting berkaitan dengan penelitian. Catatan tersebut sangat diperlukan untuk mereduksi data dari lapangan dalam pengolahan dan analisis data.
- 4) Observasi, yaitu pengamatan secara langsung peneliti terhadap objek penelitian untuk mendapatkan gambaran secara langsung.
- 5) Studi Literatur, yaitu mempelajari buku-buku sumber untuk mendapatkan data atau informasi teoritis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- 6) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.

## **G. Lokasi dan Subjek Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur dan Polsek Warungkondang dalam wilayah hukum Polres Cianjur.

### **2. Subjek Penelitian**

Menurut S. Nasution (1996: 12) dijelaskan bahwa: “Subjek penelitian adalah sumber yang dapat memberikan informasi, dipilih secara *purposive* dan pertalian dengan *purpose* atau tujuan tertentu”. Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teknik *purposive* sampel yaitu menentukan orang yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian dengan berdasarkan pada kriteria sebagai berikut : 1) informatif; 2) komunikatif; dan 3) representatif.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang dijadikan subjek penelitian ini yaitu:

- 1) Masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda
- 2) Aparat Kecamatan/Desa yang terdiri Camat Warungkondang dan Kepala Desa
- 3) Petugas Polmas Polsek Warungkondang

Merujuk pada pendapat S. Nasution (1996: 10):

“Data atau informasi dari satu pihak harus di *check* kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga, dan seterusnya dengan menggunakan metode yang berbeda-beda. Tujuannya ialah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data”.

